



Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Pelindungan Data Pribadi

CfDS
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Penulis



**Josia Paska Darmawan
Amelinda Pandu Kusumaningtyas
Ruth Tarullyna Simanjuntak
Nadia Elaesiana
Perdana Karim**

Pelindungan Data Pribadi

Pengelolaan pelindungan data berimplikasi pada banyak sektor, seperti hak asasi manusia, ekonomi, inovasi, hingga optimasi layanan publik.

Namun, pelindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat pun masih beragam. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Perjalanan dalam mengesahkan RUU PDP ini tidak hanya melibatkan para pelaku kepentingan saja tetapi juga perlu melibatkan input dari masyarakat. Maka dari itu, penting pula untuk mengetahui pandangan dan pendapat masyarakat mengenai proses pembuatan dan pengesahan RUU PDP. Menggunakan survei dan analisis media sosial, riset ini bertujuan untuk memahami pandangan dan pendapat masyarakat terkait data pribadi dan RUU PDP.

Referensi

Kajian ini dirumuskan oleh Center for Digital Society (CfDS), pusat studi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Institusi ini didirikan sebagai upaya keterlibatan penelitian dalam perkembangan dinamika sosial-politik kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan teknologi informasi. Oleh karenanya, kajian ini disusun sebagai upaya mengangkat isu perlindungan data pribadi di Indonesia yang didukung oleh Meta.

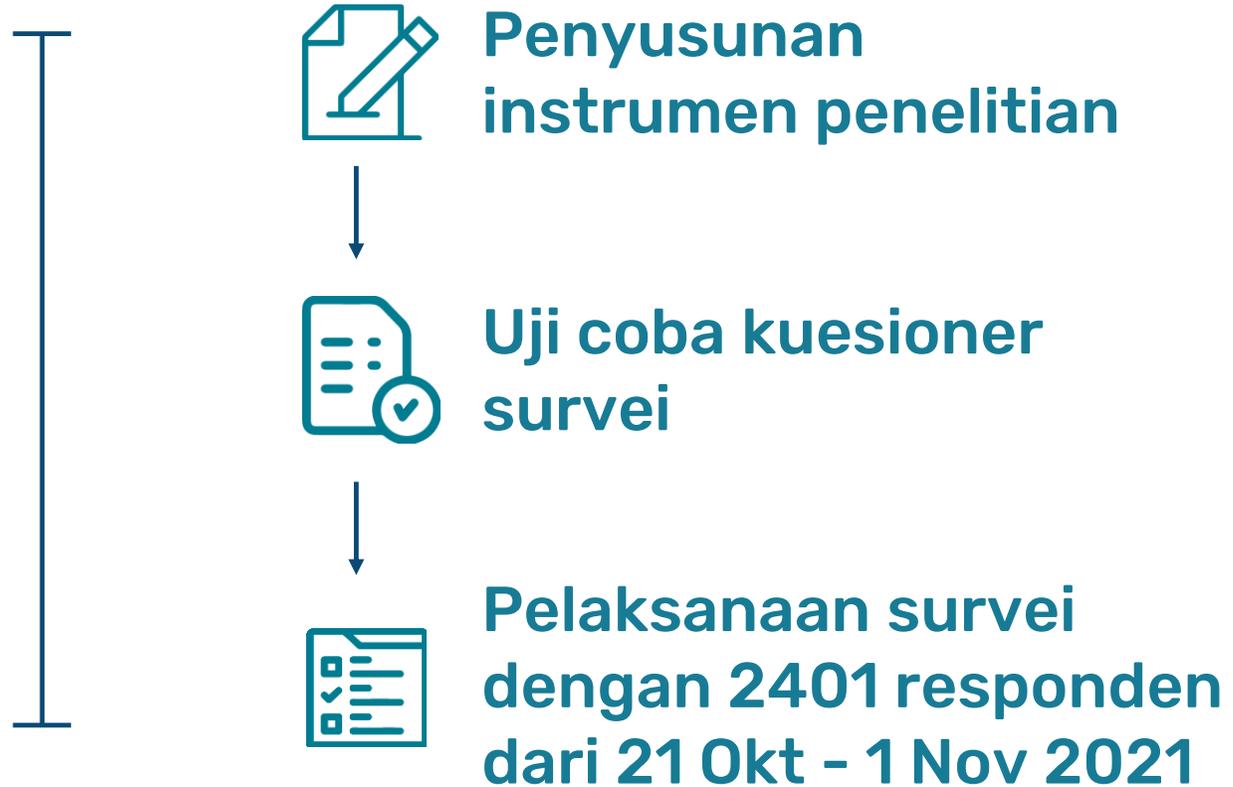
Disclaimer

Penelitian ini dilakukan dalam satu periode tertentu dan disiapkan sebagai informasi. CfDS maupun Meta tidak menggunakan data/data pribadi subjek penelitian untuk kepentingan internal pengembangan institusi.



Metodologi

Metode Survei



Karakteristik Demografi Responden



45,9%
Laki-laki



52,9%
Perempuan



1,2%
Tidak menjawab



27,6%
Internet rumah
berlangganan



72%
Paket data
mobile

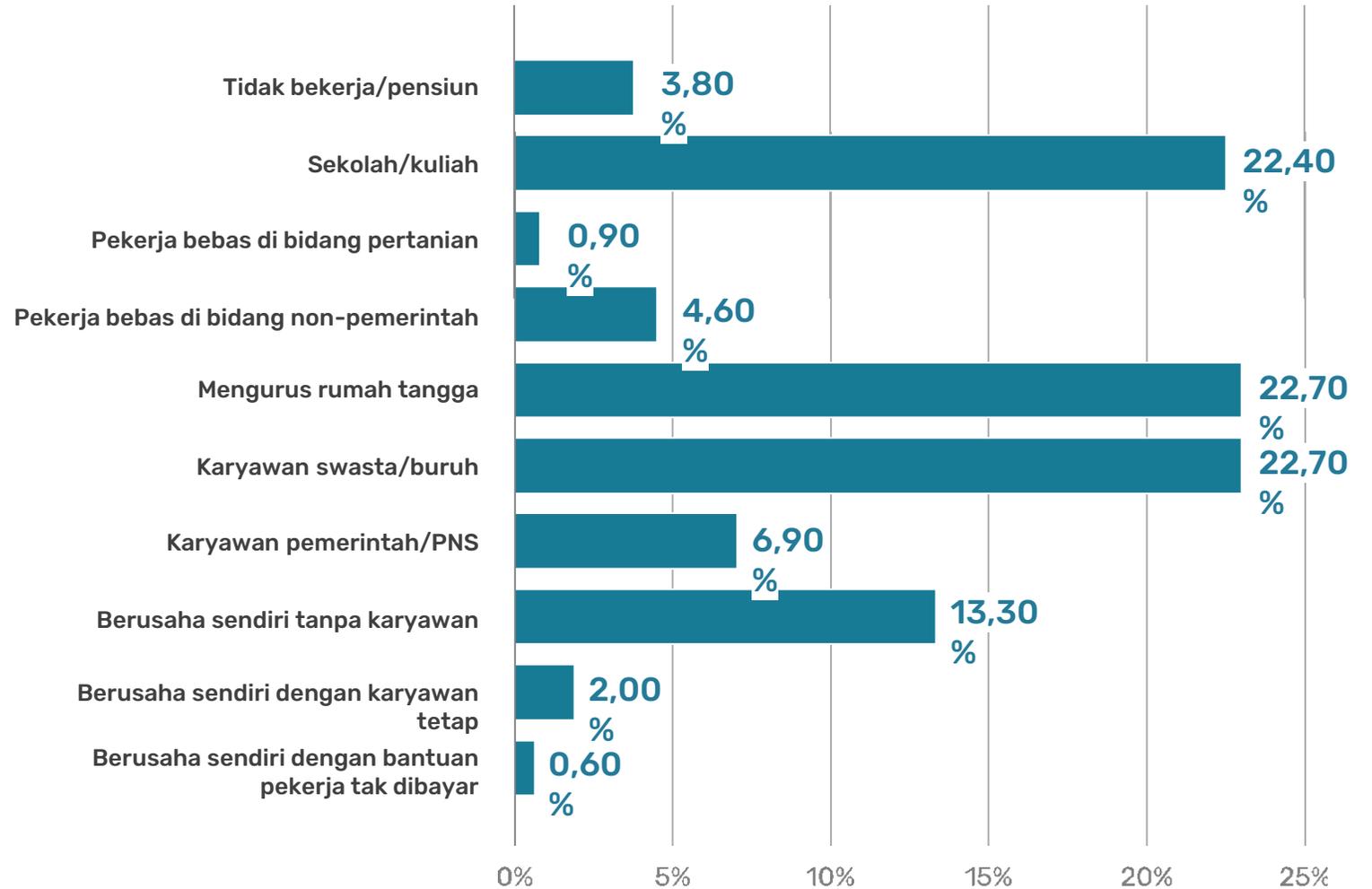


0,5%
Tidak memiliki
koneksi
internet pribadi

Ijazah Terakhir

0,1%	Tidak punya ijazah
0,7%	SD/ sederajat
5,2%	SMP/ sederajat
53,3%	SMA/ sederajat
6,5%	Diploma (DI, DII, DIII, DIV)
27,5%	Strata 1
6,1%	Strata 2
0,6%	Strata 3

Pekerjaan Responden



Analisis Media Sosial

- Data diambil dari Twitter menggunakan Twint dengan beberapa kata kunci, seperti "RUU PDP", "kebocoran data", "data pribadi", dan "keamanan data"
- Periode pengumpulan data: 1 Juli – 30 September 2021
- Peneliti kemudian menganalisis sentimen dan konten dari 26.406 tweets yang berhasil dikumpulkan



Tujuan Penelitian

Survei Pengguna Internet

- Mengetahui pemahaman masyarakat tentang PDP
- Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap urgensi RUU PDP
- Memetakan aspirasi maupun kekhawatiran masyarakat terkait PDP

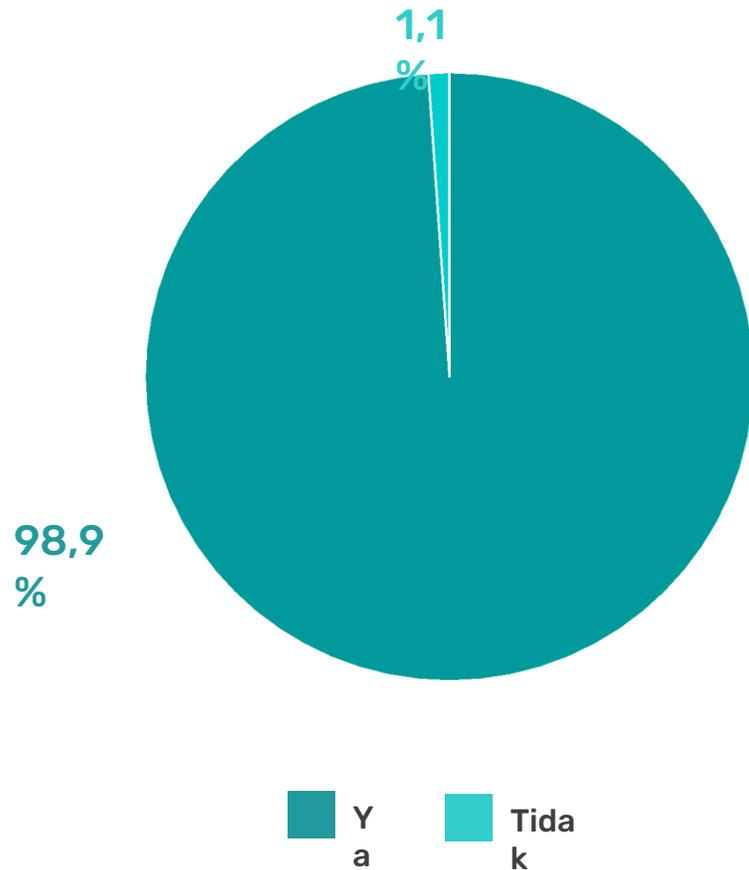
Riset Media Sosial

Mengidentifikasi persepsi masyarakat Indonesia tentang perlindungan data pribadi



Pemahaman
Masyarakat
tentang
**Pelindungan
Data Pribadi**

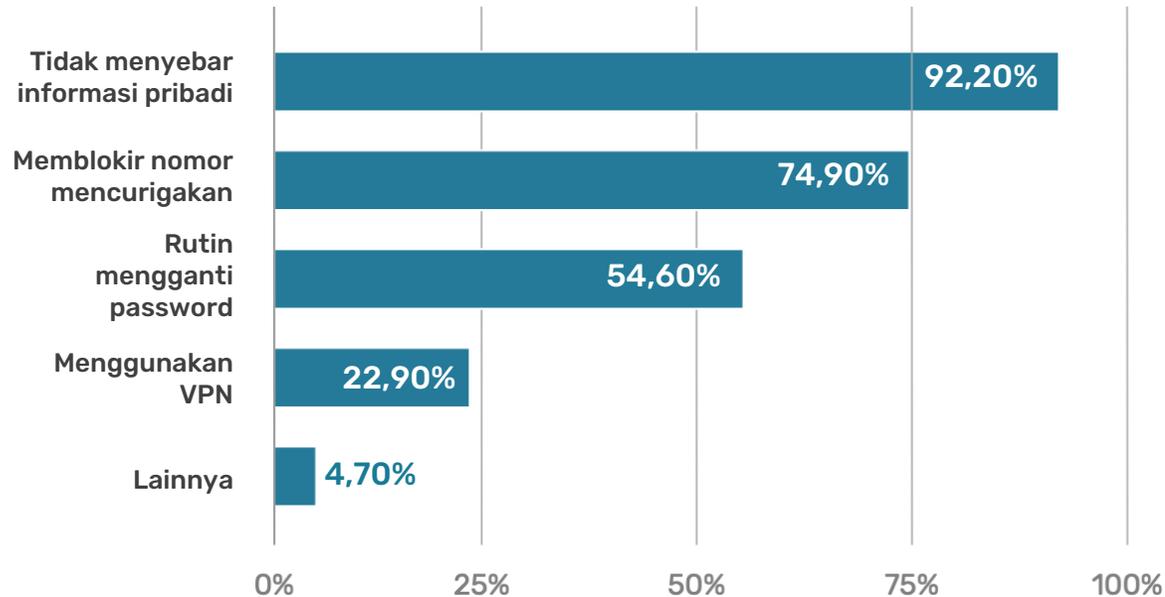
Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan Data Pribadi?



Mayoritas responden (98.9%) mengaku mengetahui apa yang dimaksud dengan Data Pribadi.

Namun ketika diminta untuk mengidentifikasi lebih lanjut, hanya **18.4%** responden (441 dari 2401 responden) yang mampu mengidentifikasi jenis-jenis data pribadi.

Tindakan Pelindungan Data Pribadi yang Telah Dilakukan

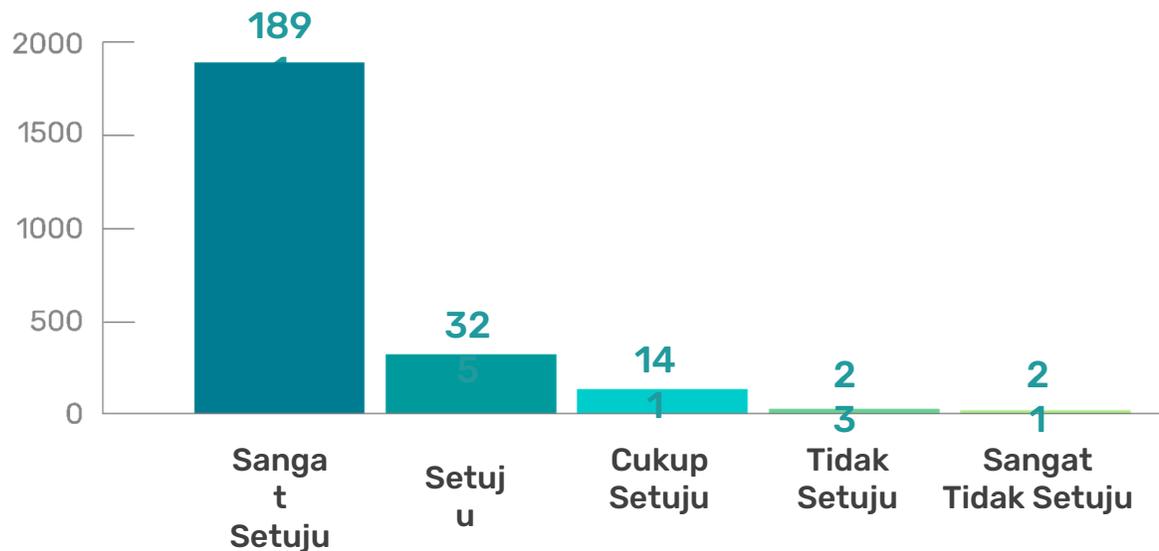


Mayoritas responden mengaku mengetahui dan telah melakukan langkah-langkah sederhana untuk melindungi keamanan Data Pribadi.

92,2% responden membagikan bahwa mereka tidak menyebar informasi Data Pribadi dengan mudah. Sedangkan itu, 74.9% responden mengaku memblokir nomor, akun, maupun alamat email yang tidak dikenal dan mencurigakan. Terdapat pula 4,7% responden yang melakukan langkah-langkah pelindungan data lebih lanjut misalnya seperti menggunakan watermark, menggunakan aplikasi open source, dan memastikan data terenkripsi.

Kekhawatiran Responden terkait Pelindungan Data Pribadi (1)

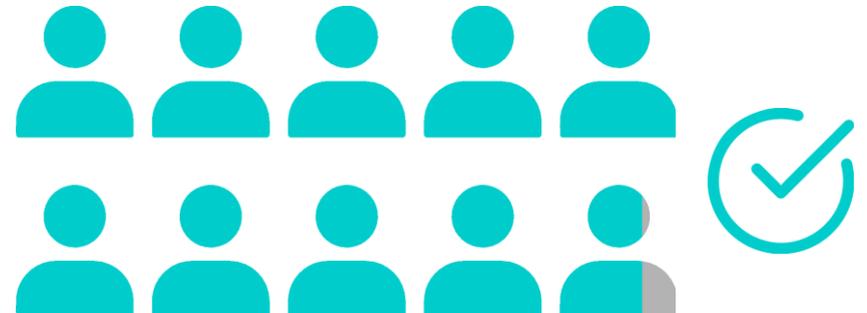
Saya khawatir Data Pribadi saya disalahgunakan oleh perusahaan, pemerintah, maupun pihak ketiga.



Mayoritas responden khawatir Data Pribadi mereka disalahgunakan oleh pihak manapun. Responden bahkan merasa sangat khawatir akan terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

99,5%

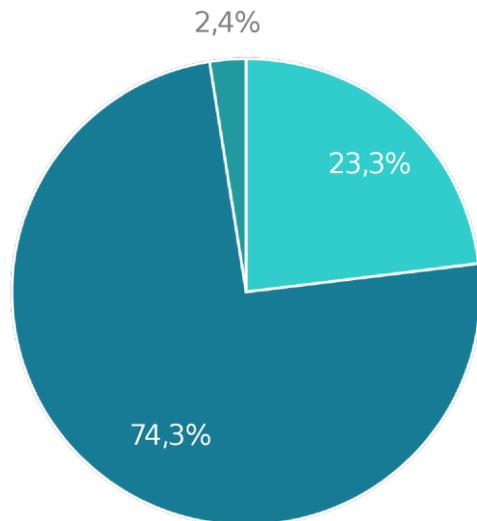
Hampir seluruh responden (99.5%) setuju bahwa Pelindungan Data Pribadi merupakan hal yang penting.



Selaras dengan kekhawatiran ini, mayoritas responden (98.8%) mengaku telah mempraktikkan langkah-langkah pelindungan Data Pribadi secara mandiri.

Kekhawatiran Responden terkait Pelindungan Data Pribadi (2)

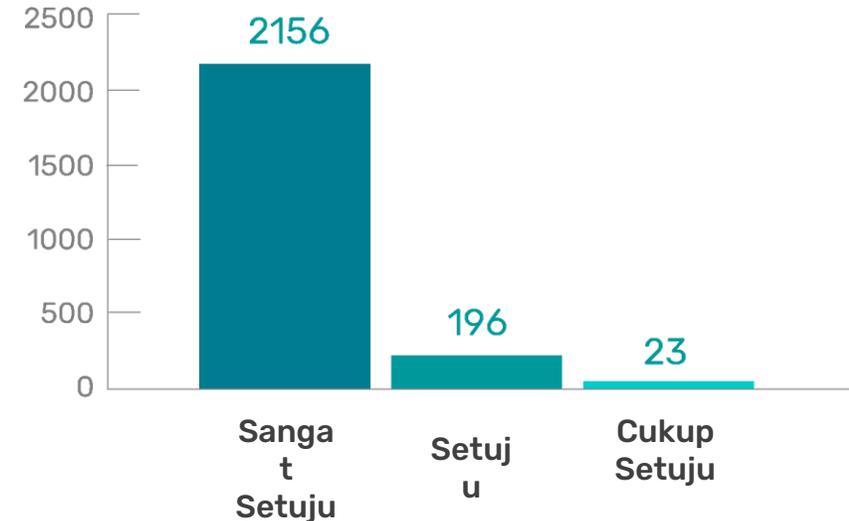
Mayoritas responden mengaku mengetahui apa yang dimaksud dengan kejahatan siber yang berkaitan dengan Data Pribadi.



Apakah Anda pernah mendengar dan/atau mengalami tindak kejahatan siber terkait penyalahgunaan data pribadi?

- Ya, pernah mendengar
- Ya, pernah mendengar dan mengalami
- Tidak pernah mendengar dan mengalami

Menurut saya, kejahatan siber memiliki dampak negatif pada kehidupan korban di dunia nyata.



Saat ditanya lebih lanjut, mayoritas responden (98.9%) setuju bahwa kejahatan siber terhadap Data Pribadi dapat berdampak negatif pada kehidupan korban di dunia nyata. Lebih detail, 89.8% responden merasa sangat setuju, 8.2% responden mengaku setuju, dan 1% responden menjawab cukup setuju.



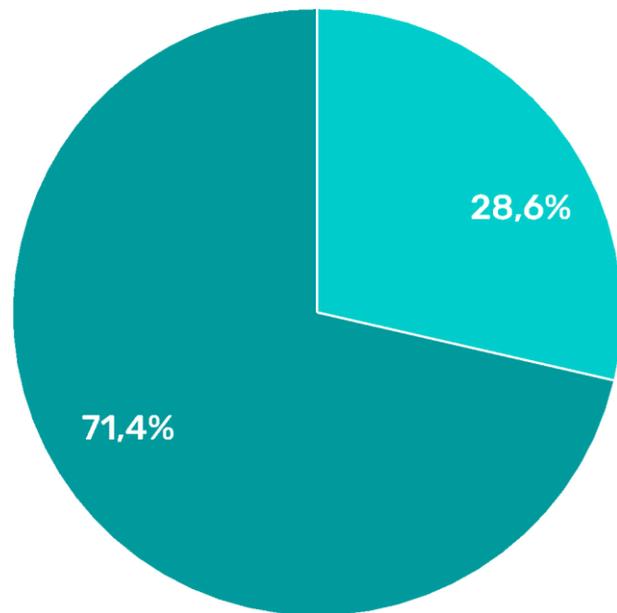
Tidak tahu kemana harus
melapor bila menjadi korban
kejahatan siber terkait Data
Pribadi

Namun saat ditanya
lebih lanjut, 29.2%
responden mengaku
tidak mengetahui
institusi pemerintah
yang bertanggung
jawab menangani kasus
kejahatan siber terkait
Data Pribadi.



**Persepsi
Masyarakat
terhadap RUU
PDP**

Apakah Anda mengetahui tentang RUU PDP?



■ Ya
■ Tidak

**Lebih dari
seperempat
responden (28,6%)
belum mengetahui
tentang RUU PDP.**

Karakteristik responden yang belum mengetahui tentang RUU PDP



55,3%
Laki-
laki

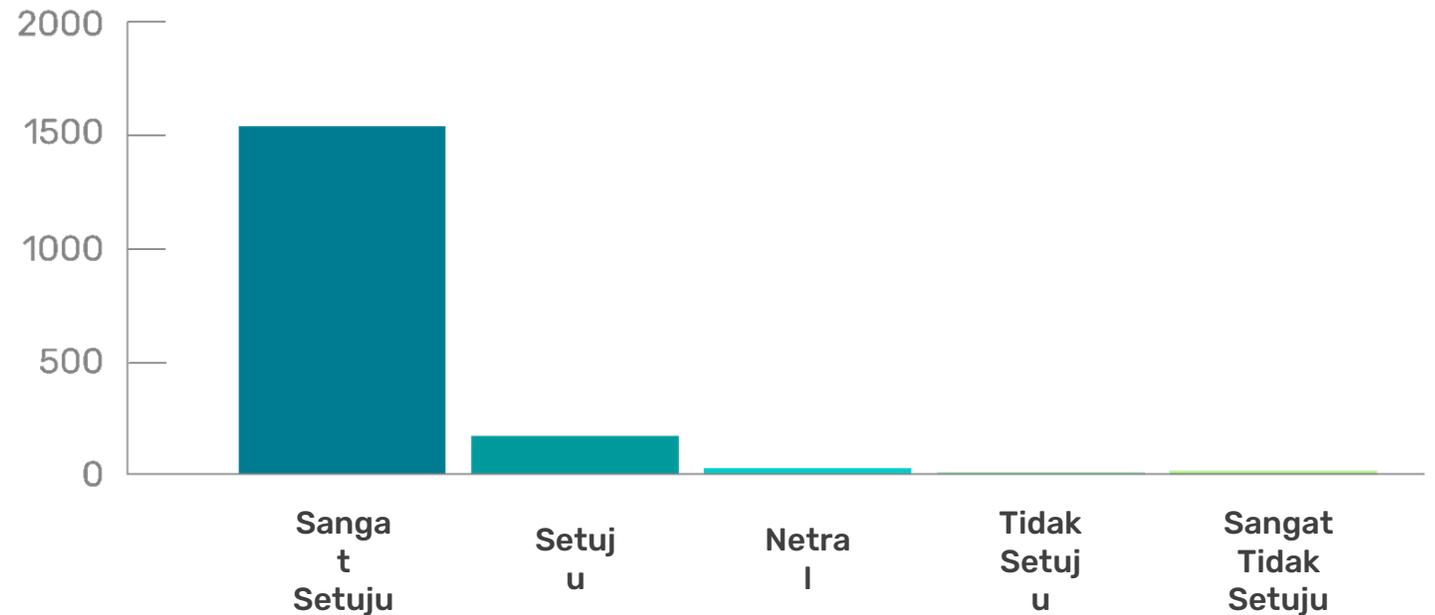


46,3%
Lulusan SMA/Sederajat

88.4% responden sangat setuju bila RUU PDP segera disahkan.

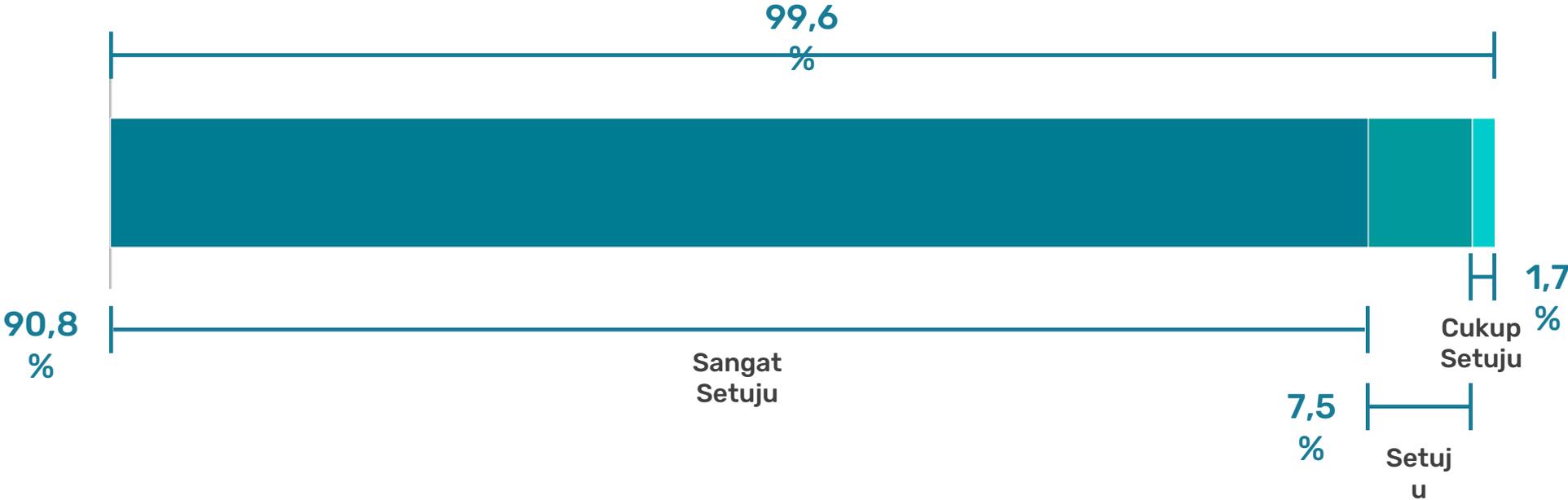
Hanya 0,35% (6) orang yang tidak setuju RUU PDP untuk segera disahkan.

Menurut saya, RUU PDP perlu untuk segera disahkan.



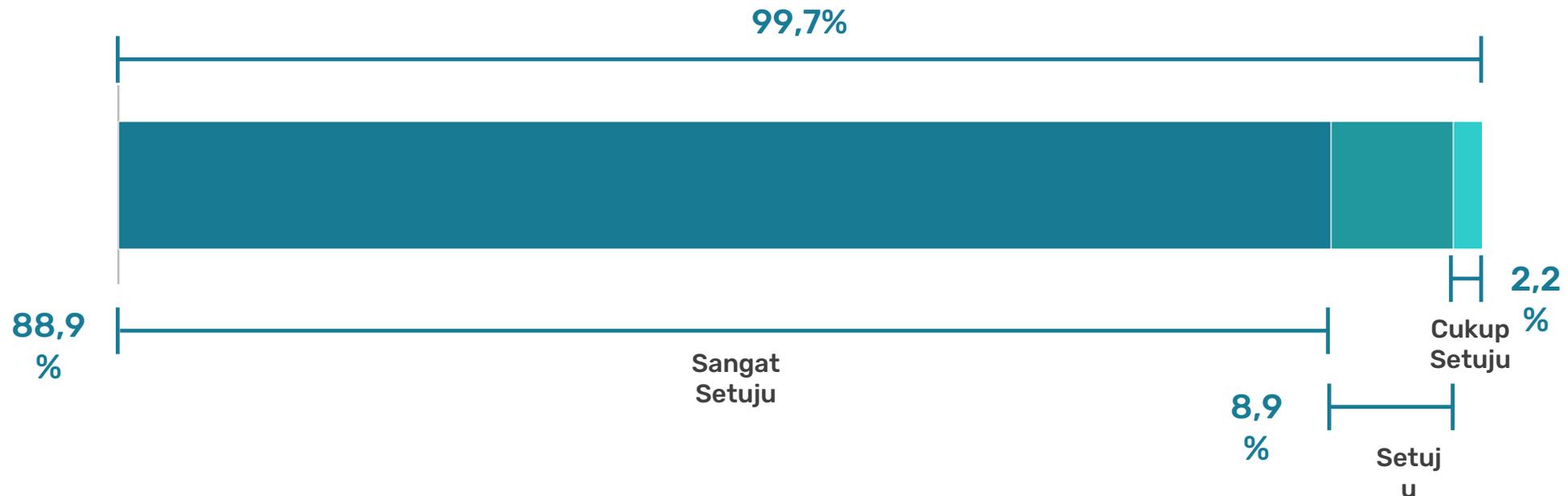
99.6% responden merasa perlu untuk mengetahui tujuan penggunaan Data Pribadi sebelum menyerahkan Data Pribadi kepada penyedia jasa.

Lebih rinci, dari 99.6% responden tersebut, 90.8% (2172) merasa sangat setuju, 7.5% (180) menjawab setuju, dan 40 (1.7%) mengaku cukup setuju.



99.7% responden merasa perlu untuk memberikan persetujuan secara eksplisit sebelum Data Pribadi nya digunakan oleh pihak lain.

Lebih lanjut, dari 99.7% responden tersebut, 88.9% (2128) merasa sangat setuju, 8.9% (214) menjawab setuju, dan 2.2% (52) mengaku cukup setuju.

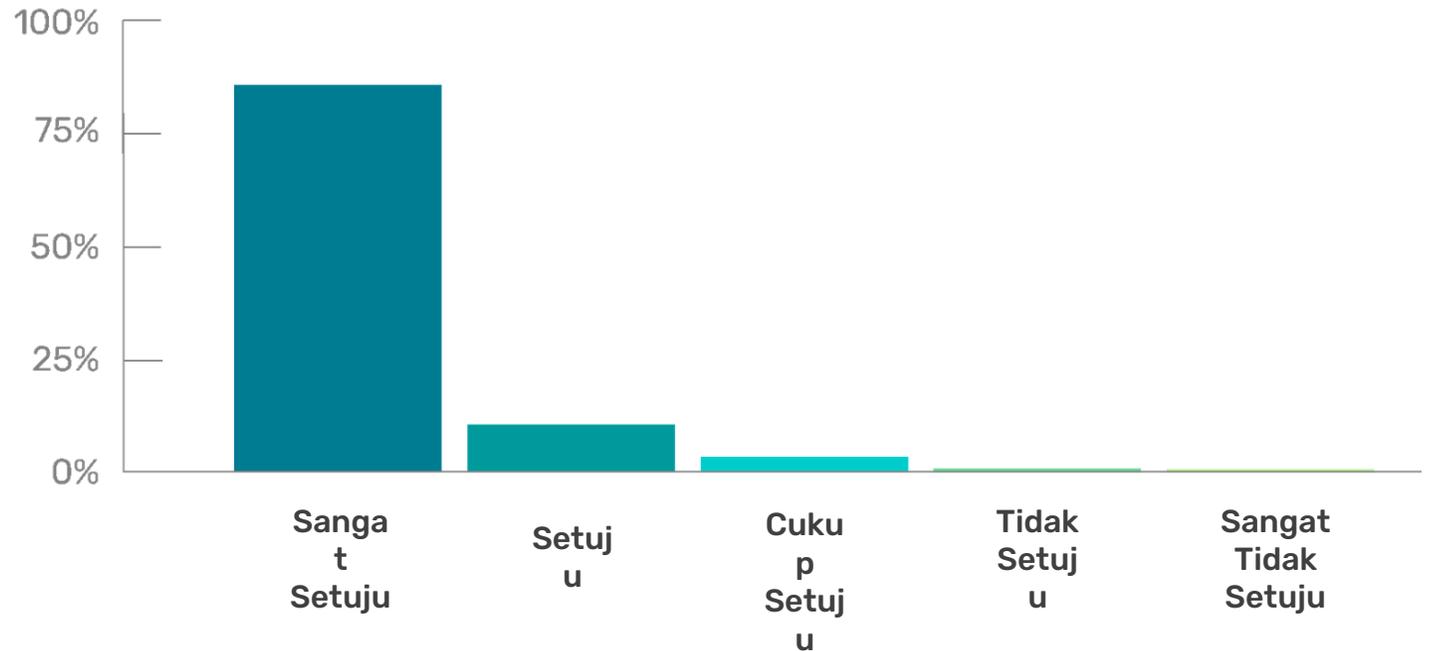


99.2% responden

menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk meminta penghapusan Data Pribadi yang telah mereka serahkan kepada penyedia jasa maupun pengelola Data Pribadi.

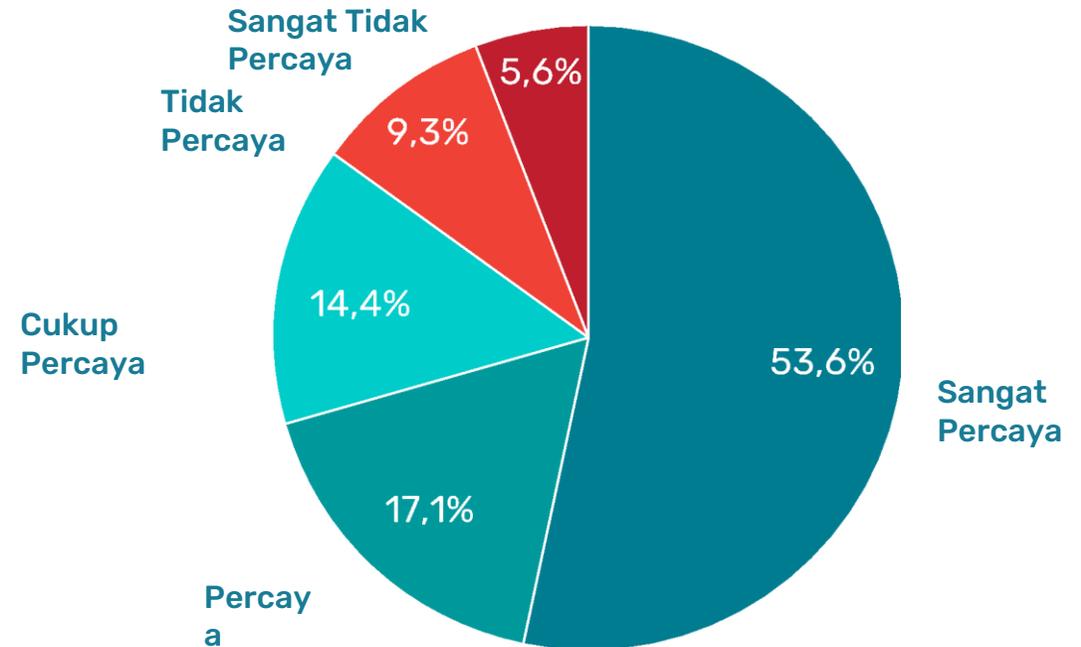
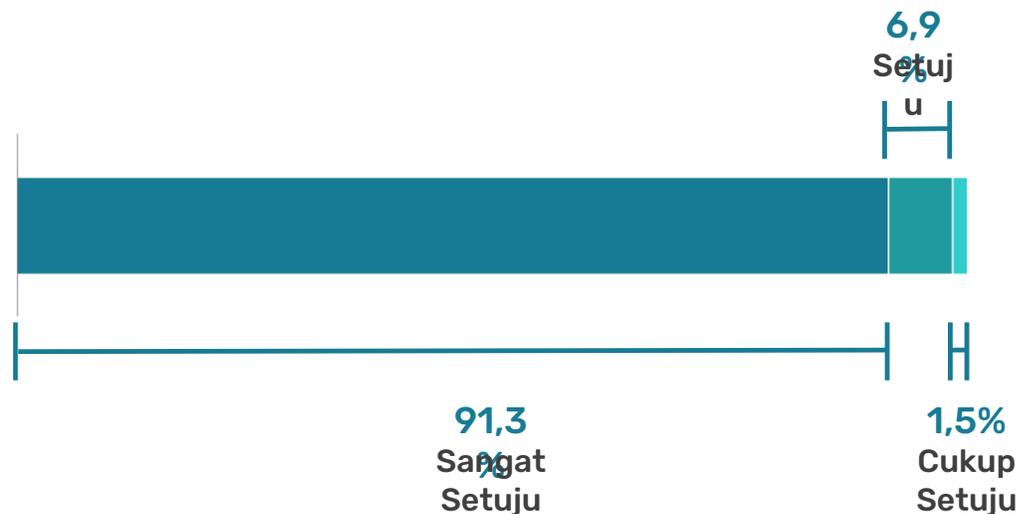
Lebih jelasnya, 85.5% merasa sangat setuju, 10.3% merasa setuju, dan 3.4% merasa cukup setuju. Sedangkan itu, terdapat sejumlah kecil responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut (0.5% menjawab tidak setuju dan 0.3% menjawab sangat tidak setuju).

Menurut saya, saya berhak meminta penyedia jasa maupun pengelola untuk menghapus Data Pribadi yang telah saya serahkan.

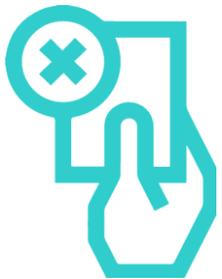


Mayoritas responden (99,7%) meyakini bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan Data Pribadi masyarakat Indonesia.

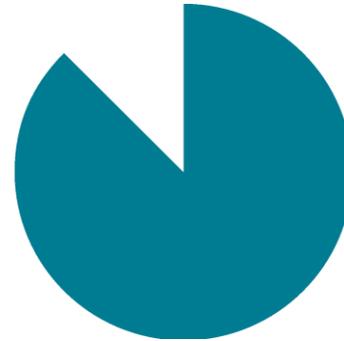
Apakah Anda percaya dengan kemampuan pemerintah mengelola dan menjaga keamanan Data Pribadi Anda?



Sebesar 14,9% responden tidak percaya dengan kemampuan pemerintah mengelola dan menjaga keamanan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang meyakini bahwa pemerintah wajib menjamin keamanan data pribadi masyarakat namun menyangsikan kemampuan pemerintah saat ini.

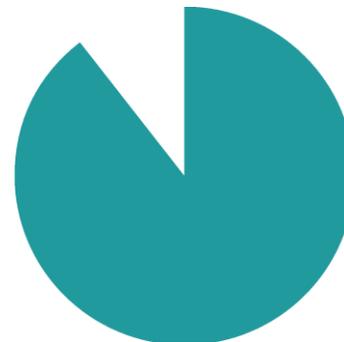


Mayoritas responden sangat setuju pemberian sanksi pada institusi atau pihak terkait bila terjadi kebocoran Data Pribadi.



87.6%
dari 2401
responden

sangat setuju untuk memberi sanksi kepada **institusi negara** apabila terjadi kebocoran Data Pribadi di sistem institusi tersebut.



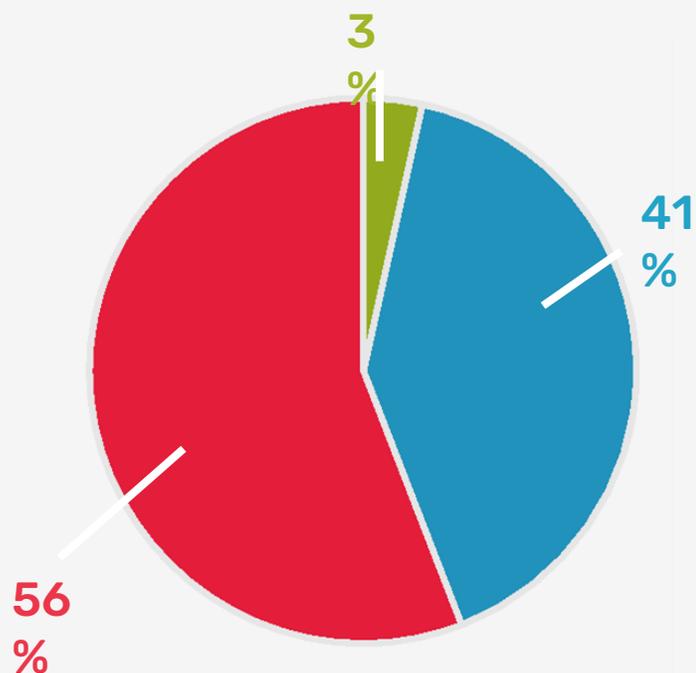
89,5%
dari 2401
responden

sangat setuju bila **pihak swasta** seperti perusahaan, dikenai sanksi bila terjadi kebocoran Data Pribadi.



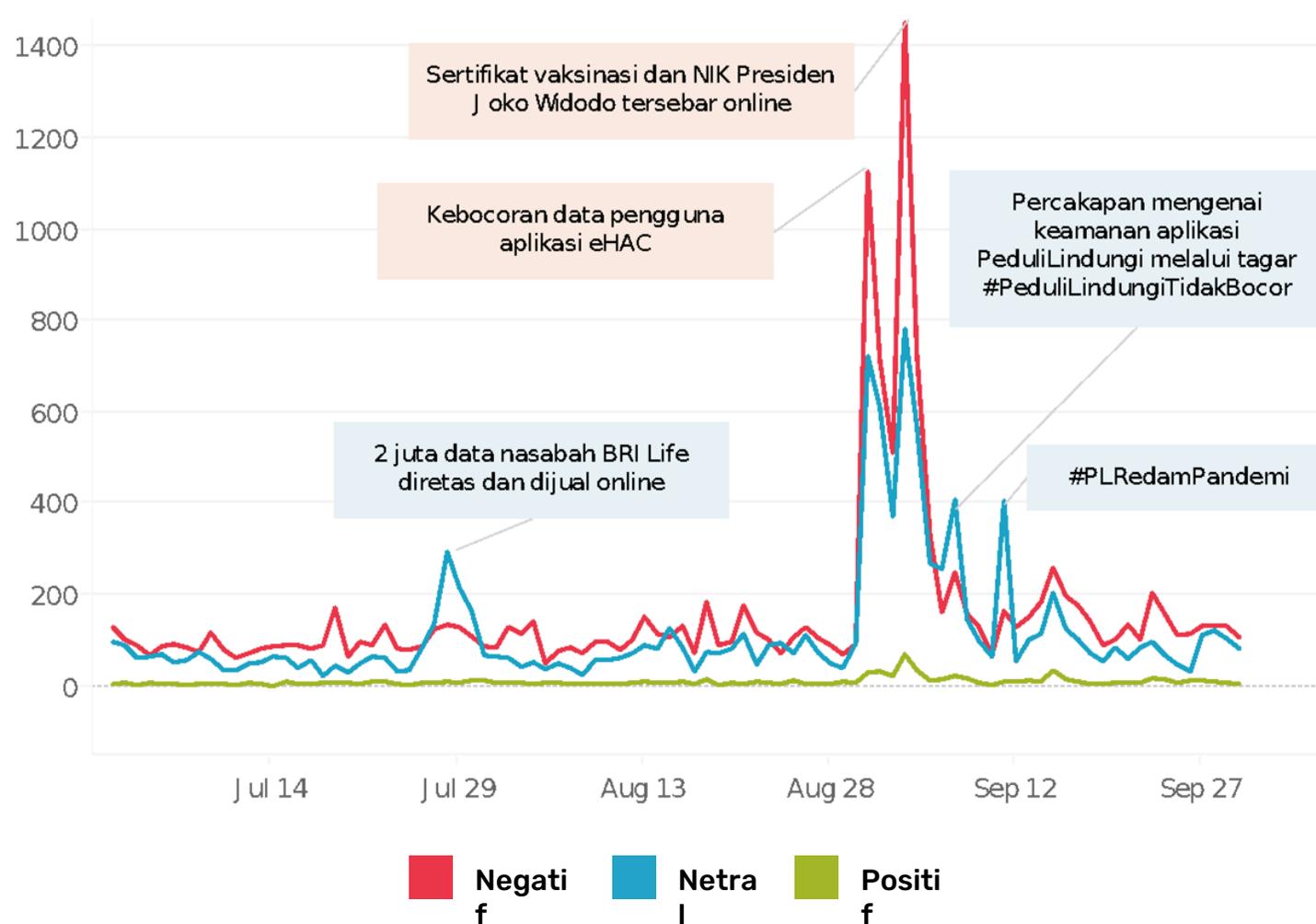
Temuan **Media Sosial**

Sebagian besar tweet terkait keamanan data pribadi memiliki sentimen negatif



Dari total 26.406 tweets, terdapat:
14.683 tweets dengan **sentimen negatif**
10.825 tweets dengan **sentimen netral**
898 tweets dengan **sentimen positif**

Jumlah Tweet per Hari per Sentimen



Jumlah tweet dengan sentimen negatif meningkat secara signifikan ketika terjadi kasus kebocoran data, contohnya pada tanggal 31 Agustus dan 3 September 2021

Kritik terhadap pemerintah mendapatkan engagement yang tinggi

Banyak pengguna Twitter yang setuju dengan kritik terhadap kinerja pemerintah, terutama Kominfo, dalam menangani kasus kebocoran data.

Selain itu, tweet mengenai tips dan anjuran untuk menjaga keamanan data juga mendapatkan engagement yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian yang cukup besar kepada perlindungan data pribadi.

Chiko™ @fecliko Netral

Data toped bocor
Data bpjs bocor
Data ehac bocor

Kementeriannya:

Kementerian Kominfo @kominfo - 31 Agt
Agustus udah mau selesai aja nih! Coba dong deskripsin Agustus 2021 lewat 3 emoji-

11:15 AM - 31 Agt 2021 - Twitter for Android

9.964 Retweet 276 Tweet Kutipan 22,81 Suka

Dnan @Dyaningy Netral

Kalau mau upload KTP ditandain dulu biar bisa dilacak kalo besok jadi korban kebocoran data.

Bagaimana caranya?

[A Thread]

9:53 AM - 29 Ju 2021 - Twitter for Android

17 rb Retweet 427 Tweet Kutipan 55,3 rb Suka

n10a @nelison Netral

data penduduk Indonesia bocor ❌
data penduduk Indonesia open source ✅

4:21 PM - 3 Sep 2021 - Twitter Web App

2.396 Retweet 205 Tweet Kutipan 7.485 Suka

Paramita Mohamad @silysampi Negatif

Mau bikin sistem canggih pakai e-sertifikat atau e-tiket tapi tahap paling simpel memastikan data dimasukkan petugas garis depan dengan akurat saja belum bisa.

Belum lagi soal data bocor.

Mau sok Government 4.0 tapi kualitas SDM masih versi Beta.

8:13 AM - 1 Sep 2021 - Twitter for Android

2.072 Retweet 147 Tweet Kutipan 1.112 Suka

LaporCovid-19 @LaporCovid Negatif

Lemba ga negara yang menyimpan data warga silih berganti alami kebocoran.

Gagal Selamatkan Nyawa, Juga Gagal Lindungi Data Warga



10:03 AM - 11 Sep 2021 - Twitter for Android

2.474 Retweet 182 Tweet Kutipan 6.245 Suka

AREA JULID @AREAJULID Negatif

Dis! menurut kalian masalah apa yg saat ini harus bgt diurus sama pemerintah?

me: kebocoran data 😞

9:50 PM - 2 Sep 2021 - Twitter for iPhone

207 Retweet 114 Tweet Kutipan 4.352 Suka

Uus ei keluar rumah @uusbisaja Negatif

Tolong bang Uus, saya lagi dikajar pinjol, saya diancem data saya bakal disebar, keahlian saya bisa ngedit dan desain, saya rela ga dibayar asal bisa ngelunasin pinjol saya.

Hmmm.. sepeertinya ada yg janggal 🤔

4:20 PM - 17 Sep 2021 - Twitter for iPhone

113 Retweet 29 Tweet Kutipan 3.329 Suka

Divisi Humas Polri @DivHumas_Polri Negatif

Stop Unggah Sertifikat Vaksin Di Medsos!

Sertifikat digital vaksin Covid-19 itu memuat QR Code yang wajib dilindungi karena didalamnya memuat data pribadi kamu lho..

Jadi... Jangan pernah unggah sertifikat digitalnya ya.. karena bisa saja datanya disalahgunakan untuk kejahatan.

6:26 PM - 1 Ju 2021 - Twitter for iPhone

3.269 Retweet 189 Tweet Kutipan 5.326 Suka

Prime Manifez @primemanifez Negatif

Internet cepat, gak ada kebocoran data-data pribadi dan blokir-blokir gak jelas, Min. 🙏🙏

Kementerian Kominfo @kominfo - 21 Agt
Laptopan abih nyaman kalau.... 🙏

PAKE MOUSE **PAKE TOUCHPAD**



9:52 AM - 22 Agt 2021 - Twitter for Android

1.106 Retweet 2 Tweet Kutipan 1.899 Suka

KIRMT Roy Suryo @KIRMTRoySuryo2 Negatif

Setelah 1.3jt Data Masyarakat bocor melalui e-HAC (sebelumnya juga BPJS-Kesehatan), kini masyarakat heboh krn Sertifikat Vaksinasi ASLI dan NIK Presiden Jokowi-pun "bocor" di SocMed.

Kalau orang No 1 saja Bocor, Bgmn Masyarakat biasa ? Peran BSSN & Kominfo ditunggu serius AMBYAR

5:02 PM - 3 Sep 2021 - Twitter for Android

768 Retweet 65 Tweet Kutipan 2.504 Suka

Poin Perhatian Masyarakat terkait RUU PDP

Lembaga pengawasan yang independen

DAM @DamarJuniarto
Ke Mas Farhan, saya minta 3 prinsip perlindungan data pribadi di dalam bagian kewajiban pengendali data dan prosesor data di UU PDP, saya juga minta data protection officer dilakukan bukan oleh @kemmkominfo
Segera bahas RUU PDP agar jadi UU PDP yg memiliki standar internasional.

Not Arif nor Rafi or Afri @arfibambani
Pak @jokowi, setuju RUU Pelindungan Data Pribadi dengan dibentuknya Badan Pelindungan Independen. Pemerintah tak bisa jadi regulator sekaligus pelaku.
Ingat, Anda hanya jadi Presiden sampai 2024.

ELSAM Indonesia @elsamnews
ELSAM mendorong lembaga pengawas perlindungan data pribadi berbentuk independen. Selain untuk menjaga netralitas, independensi lembaga ini juga diperlukan untuk menyetarakan UU PDP Indonesia dengan mayoritas UU PDP negara lain.
[#RUUPDP](#) [#datapribadi](#)

Larangan penggunaan dan transfer data pribadi tanpa persetujuan subyek data

Nanda Syahputra @Nanda_nnc
Nah ini nih yg mesti di perhatiin, Draft yg disusun Menkominfo ini emang masih kacau. Bahkan ada pasal yg memungkinkan pihak swasta kuasai data kita (dengan modus riset, dsb). Harus diubah tuh draft RUU PDP.
[@ismailfahmi](#)

toekang lahang @45d3nn_
Membalas @Dennysiregar7 dan @Telkomsel
Inilah perlunya UU perlindungan data pribadi di sahkan, klo ga perusahaan2 dg mudahnya menambang data Para konsumen atau masy lainnya. Dan menjual dg seenaknya, Kan ngeri bang, lawan terus 🙏🙏

Loophole Academy @loopholeacademy
Apakah persetujuan kita sebagai pengguna sudah mencakup juga persetujuan bagi PeduliLindungi untuk memberikan data pribadi ke Telkom dan seluruh afiliasinya?
Jika ya -> Tindakan ini tidak masalah
Jika tidak -> Tindakan ini melanggar prinsip perlindungan data pribadi
Asumsi @asumsico · 27 Sep
Aplikasi PeduliLindungi kembali dikritik. Kali ini dari Cyber Security Researcher & Consultant, Teguh Apriyanto.
[asumsi.co/post/peduli-li...](#)

Sanksi dan akuntabilitas bagi pengendali data

Ismail Fahmi @ismailfahmi
Kalau di Eropa, dengan GDPR (General Data Protection Regulation) bisa. Amazon didenda 500 juta eur, Google 50 juta eur.

Di kita belum ada UU yg mengatur. Semoga RUU PDP mengcover denda spt itu, dan segera disahkan.
Azhar Syams @syams_azhar · 1 Sep
Membalas @ismailfahmi
Nuntut ganti rugi imateriil bisa ga?
Misal ganti ruginya bisa minta ganti wig dengan yang asli?
Atau reset/nge-random NIKnya? Biar ada bahan kerjaan aja..
Kalo mereka ngerasa salah itu juga...
Ujungnya... hanjakal

OrangDalamIstana @DalamIstana
Harap berhati2 untuk pengguna Bank BRI atas bocornya 2 juta data pribadi ini. Ini pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi. Kalo sudah begini. Pertanggung jawabannya bagaimana nih?

Yusuf Maulana @cupexpert
Netizen harus paham terkait isu RUU PDP ini. Saat ada pencurian data, netizen bisa meminta ganti rugi kepada penyedia layanan/penyimpan data. Lumayan kan bisa buat gantiin beli kuota.

Rekomendasi Kebijakan

- 1. Upaya peningkatan literasi digital untuk masyarakat Indonesia, dengan pendekatan multi-stakeholder baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan tingkat dasar hingga universitas, sektor privat/platform teknologi, serta lembaga masyarakat**
- 1. Keterbukaan pemerintah sebagai pengemban kebijakan (Kementerian Komunikasi dan Informatika) serta DPR RI untuk menerima masukan dalam proses perumusan hingga nantinya mencapai evaluasi implementasi, khususnya yang berdampak pada kelompok UMKM - korporasi**
- 1. Membuat badan publik independen yang membawahi UU PDP di Indonesia untuk mengevaluasi dan memonitor implementasi kebijakan bagi kepentingan publik**